

## DAFTAR PUSTAKA

- Alatas. 2008. **Korupsi : Sifat, Sebab dan Fungsi, alih bahasan Nitworno** (Jakarta: LP3ES,1987)
- . 2008. **Sosiologi Korupsi : Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer**, alih bahasa AL Ghozie usman (Jakarta : LP3ES,1975)
- Chazawi, Adami, Drs, SH. 2011. **Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi Di Indonesia**. Jakarta : Bayumedia.
- . 2013. **Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi**. Jakarta : Bayumedia
- Efendy, Marwan, Dr, SH. 2012. **Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana**. Jakarta : Referensi
- Harahap, Yahya, M, SH. 2008. **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP**. Jakarta:Sinar Grafika
- . 2007. **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan**. Jakarta:Sinar Grafika
- . 2009. **Pembahasan Permasalahan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali**. Jakarta: Sinar Grafika
- Husein, Harun, M. 1991. **Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana**. Jakarta: Rineka Cipta
- Ibrahim, Jhonny, Prof, SH. 2009. **Teknik Penulisan Hukum Normatif**. Jakarta : Bayumedia
- Kaligis, O.C, Prof.Dr, SH, MH. 2012. **Kerugian negara Dalam Kasus Korupsi BPK vs BPKP**. Jakarta : Yarsif Watampone
- . 2012. **Dasar Hukum Mengadili Kebijakan Publik**. Bandung : Alumni Karyono, Akt.  
2013. **Forensic Audit** .Jakarta: Andi Ofset
- Krinawati, Dani, dkk. 2006. **Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus**. Jakarta : Pena Pundi Aksara
- Lamintang, P.A.F dan Lamintang, Theo. 2010. **Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi**. Jakarta: Sinar Grafika.

- Muladi. 2002. **Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana**. Cetakan Kedua. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- M.Unger, Roberto. 2008. **Teori Hukum Kritis. Posisi Hukum dalam Masyarakat Moderen**. Yogyakarta: Kanisius
- Purjono. 2011. **Peran Audit Investigasi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Lingkungan Instansi Pemerintah**. Jakarta : BPPK
- Rahardjo, Satjipto. Prof, SH. 2006. **Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia**. Cetakan Kedua. Jakarta : Buku Kompas
- , 2010. **Penegakan Hukum Progresif**. Jakarta : Buku Kompas
- R.M. Suharto. 2006. **Penuntutan Dalam Praktik Peradilan**. Jakarta: Sinar Grafika
- Soedarwan DR. 1997. **Audit Kecurangan (Fraud Auditing)**. Yayasan Pendidikan Internal Auditing
- Soejono, Karni. 2000. **Auditing : Audit Khusus & Audit Forensik Dalam Praktek**. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Soetarna, Hendar, Dr, Drs, S.H. 2011. **Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana**. Bandung: Alumni
- Sudarmo, MM. 2008. **Fraud Auditing**. Jakarta : Pusdiklatwas BPKP
- Sudarto,Prof, SH . 1996. **Hukum dan Hukum Pidana**. Bandung: Alumni
- Syafaat, Rachmad, Dr, SH, Mhum. 2011. **Strategy Penelitian Hukum**. Jakarta. Bayumedia
- Tuanakotta, M, Theodorus. 2012. **Akuntansi Forensic Dan Audit Investigatif**. Jakarta : Salemba Empat
- Tunggal, Iman Sjahputra dan Amin Widjaja Tunggal. 2000. **Audit Kecurangan dan Akutansi Forensik**. Harvarindo

**Jurnal**

Anwar, Syamsul. 2007. **Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum**. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Kartika, Dian. **Eksistensi Bukti Permulaan Yang Cukup Sebagai Syarat Tindakan Penyelidikan Suatu Perkara Pidana (Telaah Teritik Penetapan Susno Duadji Sebagai Tersangka Oleh Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia Dalam Perkara Suap)**. Surakarta: Universitas Sebelas Maret

Rahardjo, Satjipto, Prof, SH. 2004. **Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)?**. Artikel News Letter Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis No.59 Desember 2004. Jakarta : Ekonomik

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang nomor 31 tahun 1009 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang 31 tahun 1009 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang nomor.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengawasan intern Pemerintah

### **Referensi Internet**

<http://ltjen.deptan.go.id/index.php/component/content/article/44-artikel/479-auditinvestigasimembedahfrauddanlitigasi>

home page: UN *Office for Drug Control and Crime Prevention* (UN-ODCCP)

